

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) membangun jaringan internasional untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina pada periode 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APWLD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga advokasi perempuan di tingkat regional tetapi juga sebagai aktor transnasional yang dapat menghubungkan komunitas akar rumput, organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme internasional untuk memperkuat perjuangan kesetaraan gender di Filipina.

APWLD menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi tentang kondisi perempuan di Filipina melalui strategi *information politics*. Upaya tersebut diwujudkan melalui produksi dan pengumpulan informasi dari program-program yang telah dilaksanakan melalui *Annual Reports*, penyelenggaraan *APWLD Media Fellowship* sebagai sarana dokumentasi perjuangan para *Women Human Rights Defenders* (WHRD) dan pengembangan *Feminist Accountability Map* sebagai metode pengumpulan data berbasis komunitas, selain kebijakan dan saran dari para pembuat kebijakan dari pemerintah Filipina. Selain memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan kesetaraan gender di tingkat regional dan internasional, pendekatan ini menghasilkan informasi yang dapat dipercaya.

Selanjutnya, APWLD memanfaatkan narasi dan pengalaman perempuan sebagai simbol melalui *symbolic politics* untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap masalah hak-hak perempuan di Filipina. Artikel “*Women activists profiled and red-tagged by soldiers deployed in Tondo*” yang dipublikasikan oleh APWLD Media Fellowship, serta *oral statement* Joan May Salvador pada Commission on the Status of Women ke-67 (CSW67) menunjukkan bagaimana pengalaman perempuan dan pendukung hak asasi perempuan digunakan sebagai representasi atas berbagai jenis diskriminasi, kekerasan, dan penyempitan ruang sipil yang terus dihadapi perempuan di Filipina. Penggunaan narasi tersebut berhasil memperkuat solidaritas lintas negara sekaligus meningkatkan perhatian aktor internasional terhadap kondisi perempuan di lapangan.

Dalam strategi *leverage politics*, APWLD menggunakan akses kelembagaan yang dimilikinya, terutama melalui status konsultatif khusus di United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) dan partisipasinya dalam CSW67, untuk membawa masalah kesetaraan gender di Filipina ke forum internasional. Melalui mekanisme tersebut, APWLD memperoleh legitimasi untuk menyampaikan rekomendasi, membangun kolaborasi dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil, serta memperkuat tekanan internasional terhadap pemerintah Filipina agar meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Sementara itu, *accountability politics* dibangun melalui pemanfaatan berbagai komitmen internasional yang telah diakui pemerintah Filipina sebagai alat untuk

meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Sebagai dasar untuk mengawal rekomendasi Komite CEDAW, APWLD menggunakan mekanisme *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Strategi ini menunjukkan bahwa APWLD akan mendapatkan dukungan internasional dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap perlindungan hak asasi wanita dengan menggunakan standar dan komitmen internasional. Penelitian ini sekaligus mengonfirmasi teori Keck dan Sikkink bahwa empat strategi jaringan advokasi transnasional APWLD bekerja sama untuk membangun jaringan yang efektif untuk mendorong kesetaraan gender di Filipina pada tahun 2023–2025.

4.2 SARAN

Hasil penelitian menghasilkan beberapa rekomendasi. Penelitian ini hanya berfokus pada strategi APWLD di Filipina selama periode 2023–2025 dan menggunakan perspektif *Transnational Advocacy Network*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan membandingkan strategi APWLD di negara lain di kawasan Asia Pasifik, menggunakan teori transnasional lainnya, atau menganalisis seberapa efektif advokasi APWLD terhadap perubahan kebijakan di negara-negara tersebut. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menyelidiki efek jangka panjang dari program APWLD terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan penguatan gerakan perempuan di kawasan Asia Pasifik.

Penelitian ini juga berfokus pada analisis strategi organisasi berdasarkan data sekunder dan periode 2023–2025. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat

memanfaatkan data primer dari melalui wawancara perwakilan organisasi, aktivis perempuan, maupun penyusunan kebijakan guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses advokasi dan efektivitasnya dalam perubahan kebijakan nasional. Di samping itu penggunaan perspektif teoritis lain seperti Teori Difusi Norma, Pola *Boomerang*, atau Konstruktivisme, juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi masyarakat sipil transnasional memengaruhi kebijakan negara dan implementasi norma gender.